

# **LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKj)**



## **BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 2022**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

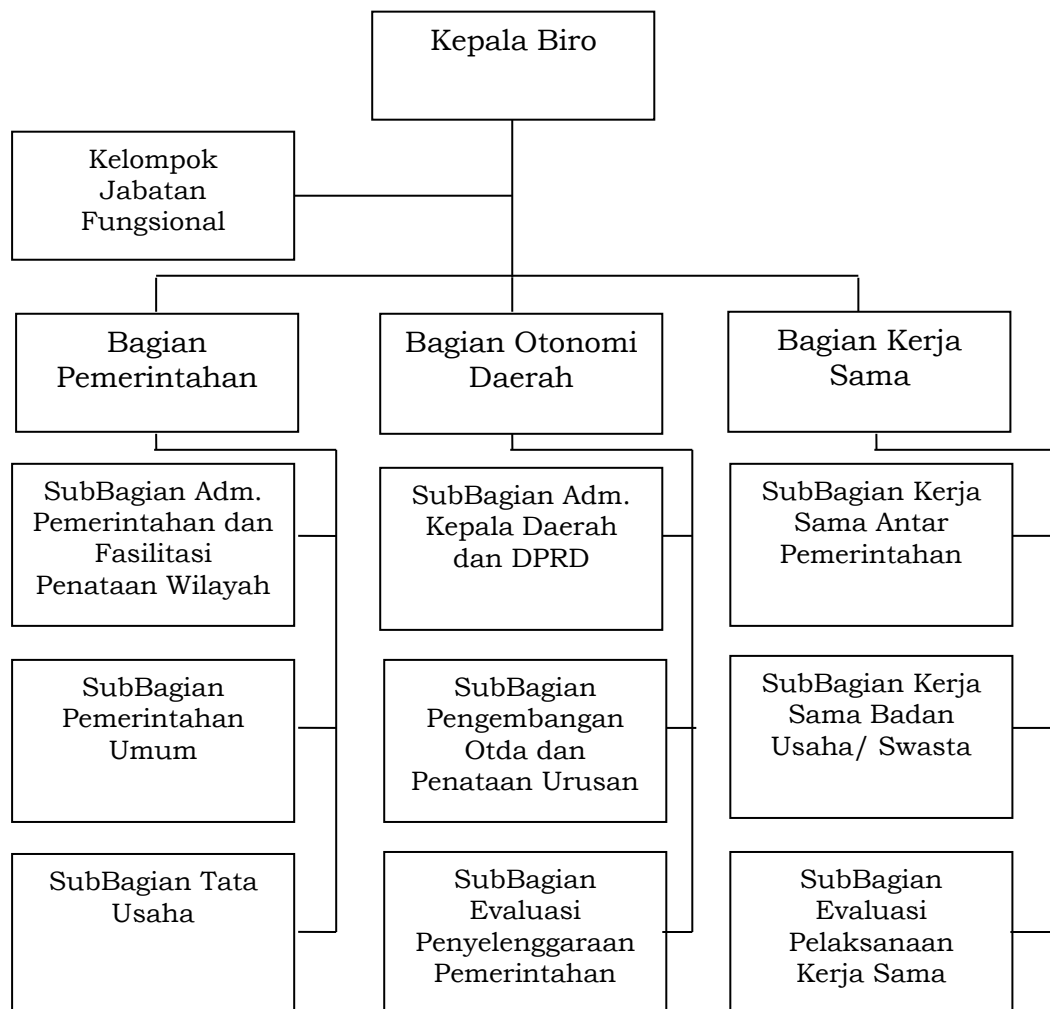
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2. Mendorong Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah di dalam pelaksanaan

program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

### 1.1 Struktur Organisasi

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jambi nomor 32 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.



## **1.2 Fungsi dan Tugas**

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama;
2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama;
3. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Bagian-Bagian pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.**

#### **a. Bagian Pemerintahan**

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas membantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan

fasilitas penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitas penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitas penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitas penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitas penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

1. Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah, mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah, perubahan nama dan pemindahan ibukota;
- Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintah;

- Menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervii, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, toponimi/rupa bumi;
- Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan yang dilaksanakan Kabupaten/Kota;
- Menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Menyiapkan bahan penyelesaian aset bekas milik asing/Cina;
- Menyiapkan bahan analisis data tentang pelaksanaan tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan;
- Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemerintah mengenai tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam forum pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;
- Melaksanakan pengembangan dan mengkaji rumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;
- Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang administrasi pertanahan;
- Melaksanakan perencanaan penetapan dan penentuan perumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tujuannya.

## 2. Subbagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi;

- Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan kawasan khusus bencana, kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

- Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- Melaksanakan pengkajian bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LkjIP, LKPJ dan LPPD lingkup biro;
- Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- Melaksanakan pembinaan pegawai ASN; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

## **b. Bagian Otonomi Daerah**

Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi Kepala Daerah dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi Kepala Daerah dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi Kepala Daerah dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi Kepala Daerah dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi Kepala Daerah dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.



1. Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan mengenai administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- Menyiapkan bahan analisis dan administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitas administrasi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan otonomi Daerah;
- Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan otonomi Daerah;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis pemetaan urusan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan otonomi Daerah dan Kabupaten/Kota; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan, mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi kinerja pemerintah Daerah dan peningkatan kfasitas Daerah;
  - Menyiapkan bahan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan Penyelengga raan Pemerintahan Daerah;
  - Menyiapkan bahan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah;
  - Menyiapkan bahan pengolahan database Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah skala Daerah;
  - Menyiapkan bahan penyusunan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - Melakukan penetapan perencanaan pengembangan kapasitas Daerah;
  - Menyiapkan bahan penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas daerah;
  - Menyiapkan bahan implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas Daerah;
  - Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembanga kapasitas Kabupaten/Kota;

- Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas Daerah dalam rangka peningkatan daya saing;
- Menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPPJ);
- Menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

### **c. Bagian Kerja Sama**

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas membantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Kerja sama mempunyai fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama ;

- penyiapan bahan pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kerja sama anatar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;dan
- pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

1. Subbagian Kerja Sama Antar Pemerintah,mempunyai tugas:

- mempersiapkan, mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerja sama antar Daerah;
- menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana program kerja sama antar Daerah;
- memfasilitasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan untuk forum-forum kerja sama antar Daerah;
- melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerja sama antar daerah;
- melaksanakan sistem pengendalian intern;
- memfasilitasi penyusunan draf kerja sama Luar Negri;
- mempersiapkan data potensi Daerah dalam rangka kerja sama Luar Negri skala Provinsi;
- menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana program kerja sama Luar Negri;
- melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerja sama Luar Negri;

- mengelola administrasi izin ASN Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Negri;
- mengkaji laporan perjalanan dinas Luar Negri yang berpotensi untuk dilakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi;
- menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi izin ke Luar Negri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alasan penting;
- menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi izin ke Luar Negri bagi anggota/pimpinan DPRD dengan alasan penting; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Subbagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta, mempunyai tugas:

- mempersiapkan dan mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerja sama Badan Usaha/Swasta/pihak ketiga;
- memfasilitasi kerja sama Pemerintah Provinsi dengan badan usaha;
- melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerja sama Badan Usaha/Swaata/pihak ketiga; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama, mempunyai tugas:

- menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta;
- melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta; dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

### **1.3 Isu-Isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi, yang diukur dengan indikator berupa nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi, yang diukur dengan indikator yaitu, Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
3. Meningkatnya kerjasama lintas sektorat dengan Provinsi Jambi berupa Jumlah kerjasama yang difasilitasi baik antar pemerintah maupun kerjasama dengan badan usaha/ swasta.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berupa nilai IKM Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

### **1.4 Keadaan Pegawai**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah ditunjang oleh 33 orang yang terdiri dari :

1. Pejabat Struktural : 13 Orang

2. Pejabat Fungsional	:	-	Orang
3. Pelaksana	:	14	Orang
4. Pegawai PTT	:	8	Orang

Dalam hal kesetaraan gender peran pegawai perempuan dan laki-laki di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi tidaklah dibeda-bedakan. Namun demikian dari segi jumlah pegawai laki-laki masih relatif lebih banyak dibandingkan dengan pegawai perempuan. Dengan perimbangan laki-laki sebanyak 20 (dua puluh) orang (57,14%) dan perempuan sebanyak 15 orang (42,86%).

Adapun perincian Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pada Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut :

1. Strata 3 (S.3)	:	-	Orang
2. Strata 2 (S.2)	:	11	Orang
3. Strata 1 (S.1)	:	18	Orang
4. Sarjana Muda (D.3)	:	1	Orang
5. SLTA	:	5	Orang
6. SLTP	:	-	Orang

Berdasarkan golongan sebagaimana dibawah ini:

1. Golongan IV	:	6	Orang
2. Golongan III	:	20	Orang
3. Strata 1 (S.1)	:	1	Orang

## 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

**Table 1.1**  
**Sarana dan prasarana**

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Tahun Perolehan	JUMLAH		
No. Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	No. Sertifikat / No. Plat Kendaraan / No. Pabrik / No. Casis			Barang	Harga Satuan	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	9	13	14	15
1			Komputer PC	LG	-	Campuran	2010	1	10.725.000	10.725.000
2			Komputer	Futura	-	Campuran	2005	1	2.300.000	2.300.000
3			Komputer	Samsung	-	Campuran	2006	1	3.800.000	3.800.000
4			Komputer	LG	-	Campuran	2006	1	2.100.000	2.100.000
5			Komputer	Samsung	-	Campuran	2007	1	9.425.000	9.425.000
6			Komputer	Panasonic	-	Campuran	2007	1	9.425.000	9.425.000
7			Komputer	LG	-	Campuran	2011	1	9.497.000	9.497.000
8			Komputer	HP	-	Campuran	2013	1	8.750.000	8.750.000
9			Laptop	Toshiba	-	Campuran	2005	1	15.000.000	15.000.000
10			Laptop	Toshiba	-	Campuran	2007	1	1.800.000	1.800.000
11			Laptop	Toshiba	-	Campuran	2007	1	15.700.000	15.700.000
12			Laptop	Toshiba	-	Campuran	2009	1	16.850.000	16.850.000
13			Laptop	Toshiba	-	Campuran	2009	1	10.850.000	10.850.000
14			Laptop	Toshiba	-	Campuran	2010	2	11.350.000	22.700.000
15			Note Book	Sony	-	Campuran	2012	1	9.850.000	9.850.000
16			Laptop	Toshiba	-	Campuran	2012	1	9.000.000	9.000.000
17			Laptop	Toshiba	-	Campuran	2013	1	8.970.000	8.970.000
18			Komputer	LG	-	Campuran	2003	6	5.278.000	31.668.000
19			Komputer	Lenovo	-	Campuran	2012	5	9.850.000	49.250.000
20			Komputer PC	Asus	-	Campuran	2018	2	8.975.000	17.950.000
21			Komputer	HP	-	Campuran	2019	4	12.000.000	48.000.000,00
22			Notebook	HP	-	Campuran	2019	3	12.000.000	36.000.000
23			Komputer	HP	-	ebonik	2019	1		



			uter						14.960.000	14.960.000
24			Note Book	Toshiba	-	Campuran	2012	1	19.750.000	19.750.000
	02.0									
	9.01.		Lapto	Dell		Campuran	2020	1	12.039.910	12.039.910
25	47.4		p	latitu						
	7			de						
	02.0		Komp	aio		Campuran	2020	1	13.150.000	13.150.000
	6.02.		uter	optiO						
26	06.0			lex						
	3			5270						
	02.0		Komp	Dell		Campuran	2020	1	13.150.000	13.150.000
	6.02.		uter	aio						
27	06.0			optiO		Campuran	2020	1	13.150.000	13.150.000
	3			lex						
	02.0		Komp	5270						
	6.02.		uter			Campuran	2020	1	12.650.000	12.650.000
28	06.0			Acer						
	3		Komp							
	02.0		uter							
	6.02.					Campuran	2020	1	25.202.000	25.202.000
29	06.0		All In	Lenovo						
	3		One							

## 1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada tahun 2022 berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jambi. Pada tahun anggaran 2022 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.25.403.000,- dengan rincian belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.501.363.000,- dan belanja pegawai sebesar Rp 224.040.000,-.

Pada APBD Perubahan 2022, anggaran tersebut bertambah sebesar Rp 2.200.000.000,- sehingga menjadi Rp 3.925.403.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung. Belanja langsung APBD Tahun 2022 digunakan untuk membiayai 2 program yang terdiri dari 4 kegiatan dan 12 subkegiatan.

### **1.7 Sistematika LKj IP**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut : Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya

menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

#### LAMPIRAN

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Memasuki Tahun 2022, Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah menyusun Review Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026. Renstra Sekretariat Daerah merupakan manifestasi komitmen organisasi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

##### **2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah**

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu :

**“Terwujudnya Jambi Maju,  
Aman, Nyaman, Tertib,  
Amanah dan Profesional  
dibawah Ridho Allah SWT”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

**Jambi Maju** : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman

- Jambi Aman** : Tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat
- Jambi Nyaman** : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Jambi Tertib** : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

**Jambi Amanah** : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

**Jambi Profesional** : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu:

- 1 **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
- 2 **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
- 3 **Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

#### Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selama 5 tahun anggaran adalah : Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas.

#### Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran**

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Awal	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10



Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jambi	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jambi > 2,900	Skor	2,849	>2,500	>2,600	>2,700	>2,800	>2,850	>2,900
--	--	---	------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

### 2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari dokumen lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah;
2. Efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
3. Penataan Ketata laksanaan;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
6. Penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum;
7. Optimalisasi Penyelenggaraan pemerintahan umum;
8. Optimalisasi evaluasi produk hukum daerah;
9. Optimalisasi penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;

10. Optimalisasi penataan ketata laksanaan Perangkat Daerah;
11. Optimalisasi sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur;

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan sasaran misi RPJMD, Sekretariat Daerah Provinsi Jambi diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mengatasi dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan fasilitasi dan koordinasi dalam menghasilkan rumusan kebijakan umum yang berkualitas dan akuntabel. Memerlukan keterlibatan pelaku pembangunan secara partisipatif melalui peningkatan kualitas peningkatan kapasitas SDM seluruh Biro lingkup Sekretariat Daerah, pemantapan kelembagaan Biro di tunjang oleh sarana dan prasarana kerja yang berkontribusi secara optimal dalam membangun etos kerja yang prima, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Strategis**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jambi meningkat.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
		Pelaksanaan Otonomi Daerah
		Fasilitasi Kerjasama

## **2.2 Perjanjian Kinerja 2022**

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1. Meningkatnya kemampuan penyelenggaraan daerah di Provinsi Jambi	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi (>2,500 Th. 2021)	2,600
2. Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi	Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota	76 %
3. Meningkatnya kerjasama lintas sektoral dengan Provinsi Jambi	Jumlah Kerja sama yang difasilitasi	9 Kali
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	62 - 79 (B)
5. Akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	B

### **2.3 Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2022**

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2022 ini program yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari 2 (dua) program yang tertuang dalam rencana anggaran sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Rencana Kerja Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu
<b>Program Administrasi Umum</b>		<b>165.598.478</b>
<b>Kegiatan Administrasi Umum PD</b>		<b>144.319.747</b>
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.396.920
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.539.386
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.742.541
<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>		<b>3.759.724.153</b>
<b>Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>		<b>2.734.043.373</b>
1	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	2.385.051.291
2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	106.775.560
3	Fasilitasi Penataan Wilayah	242.216.522
<b>Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>		<b>778.563.130</b>
13	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	161.101.900
14	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	159.656.410
15	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	457.805.820
<b>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>		<b>247.117.650</b>
16	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	96.657.150
17	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	55.235.250
18	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	95.225.250
<b>Jumlah</b>		<b>3.925.403.000</b>

### 2.3.1 Target Belanja Tahun Anggaran 2022

Menentukan target yang ingin dicapai, target ini biasanya turunan dari sasaran strategis yang terdapat dalam organisasi perangkat daerah. Pengukuran target sebaiknya tidak hanya terbatas pada pencapaian output, tetapi juga dievaluasi bagaimana pencapaian outcome-nya. Evaluasi capaian output biasanya dilakukan dalam tahun yang bersangkutan, sedangkan evaluasi outcome mungkin saja baru akan bisa dievaluasi di

beberapa tahun yang akan datang. Evaluasi outcome inilah yang sering kita lupakan, akibatnya pelaksanaan program pemerintah mungkin semakin akuntabel, namun seberapa hasil dan manfaat dari program tersebut dalam jangka panjang tidak pernah di evaluasi.

Melaksanakan rencana sesuai jadwal. Hal ini adalah hal tersulit untuk dilakukan. Pada umumnya di instansi pemerintah akan mengalami keterlambatan penyerapan anggaran. Penyebabnya sangat kompleks, namun pada intinya adalah adanya perubahan rencana yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya. Perubahan rencana sebenarnya dimungkinkan, karena sistem anggaran berprinsip fleksibel. Namun tentunya jika perencanaannya baik perubahan itu tidak akan bersifat massive.

Sehubungan hal tersebut target belanja yang terdapat pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah 100 % dengan berpedoman pada rencana kerja anggaran, kerangka acuan kerja serta dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang tata cara belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 2.5**  
**Target Belanja**

Uraian	Target	Persentase
Belanja pegawai	Rp. 211.440.000,-	100 %
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.713.963.000,-	100 %

### 2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Startegis

Anggaran belanja Tahun 2022 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Alokasi Anggaran Per Sasaran Startegis Tahun 2022**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Kegiatan/ SubKegiatan</b>	<b>Pagu Anggaran</b>
1. Meningkatnya kemampuan penyelenggaraan daerah di Provinsi Jambi	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	457.805.820
2. Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi	Fasilitasi Penataan Wilayah	242.216.522
3. Meningkatnya kerjasama lintas sektoral dengan Provinsi Jambi	Fasilitasi Kerjasama Daerah	247.117.650
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.678.847
5. Akuntabilitas kinerja		

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022**

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Tahun 2022**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = (4/3)x100%</b>
Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi (>2,500 Th. 2021)	Skor 2,600	skor 2.849 + sertifikat dengan skor Tinggi	114 %
Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi	Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/ Kota	( 13 Permenda gri dari 17 Permenda gri )	(15 Permenda gri sub segmen batas dari 17 sub segmen)	125 %
Meningkatnya Kerjasama Lintas Sektorat dengan Provinsi Jambi	Jumlah kerjasama yang difasilitasi	9 kali	30 kali	330%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	62-79 (B)	76,94	100%

### **3.2 Evaluasi Kinerja Tahun 2022**

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci diuraikan sebagai berikut:

#### **3.2.1 Sasaran meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi**

Dalam pengukuran sasaran strategis meningkatnya nilai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Provinsi Jambi digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu :



Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi dengan rincian masing-masing indikator sebagai berikut :

**Indikator Kinerja : Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi**

Pengukuran Realiasi Kinerja atas Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi dilakukan melalui hasil evaluasi LPPD dari Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri. Oleh karena proses evaluasi atas LPPD dilakukan setelah diserahkannya LPPD kepada Kementerian Dalam Negeri (paling lambat 31 Maret tahun berikutnya), sementara penyusunan laporan kinerja SKPD dilakukan sebelum proses evaluasi tersebut. Sehingga data yang digunakan untuk menghitung realisasi kinerja tahun 2022 adalah data hasil evaluasi tahun 2020. Sementara penyusunan laporan kinerja SKPD dilakukan sebelum proses evaluasi tersebut. Sehingga data yang digunakan untuk menghitung realisasi kinerja tahun 2021 adalah data hasil evaluasi tahun 2020.

**3.2.2 Sasaran menurunnya sengketa batas wilayah administrasi**

Dalam pengukuran sasaran strategis menurunnya sengketa batas wilayah administrasi digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

**Indikator Kinerja : Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota**

Pengukuran Realiasi Kinerja atas Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota dihitung dengan formula :

$$\text{Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota} = \frac{\text{Persentase Penyelesaian Batas antar}}{\text{Persentase Penyelesaian Batas antar}}$$

Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dibagi dengan jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki batas x 100%

Sehingga, diperoleh nilai realisasi :

$$\text{Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota} \\ = 15 / 17 \times 100\% = 88,2 \%$$

Tabel 3.5: Realisasi dan Capaian Kinerja atas Indikator  
Kinerja Persentase Penyelesaian Batas antar  
Kabupaten/Kota Tahun 2022

**Tabel 3.2**  
**Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota	<b>76%</b>	<b>88,2%</b>	<b>125%</b>

#### **4.3.3 Sasaran meningkatnya kerjasama lintas sektoral dengan Provinsi Jambi**

Dalam pengukuran sasaran strategis meningkatnya kerjasama lintas sektoral dengan Provinsi Jambi digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Jumlah kerjasama yang difasilitasi, dengan rincian sebagai berikut :

**Indikator Kinerja : Jumlah Kerjasama yang di Fasilitasi**  
Pengukuran Realiasi Kinerja atas jumlah kerjasama yang difasilitasi diperoleh melalui jumlah kerjasama yang telah difasilitasi selama tahun 2022 dan menggunakan Surat Perjanjian Kerjasama.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Jumlah**  
**Kerjasama yang di Fasilitas Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Kerjasama yang di Fasilitas	<b>9 Kali</b>	<b>30 kali</b>	<b>330%</b>

#### **3.2.4 Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan public**

Dalam pengukuran sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : IKM, dengan rincian sebagai berikut :

##### **Indikator Kinerja : IKM**

Pengukuran Realiasi Kinerja atas IKM diperoleh melalui Penyebaran kuesioner terhadap berapa responden dan diperoleh Skor IKM = 76,94

**Tabel 3.4**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Skor**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Skor IKM</b>	62-79(B)	<b>76,94</b>	<b>100%</b>

1. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu 2021 dan beberapa tahun terakhir.

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan antara realisasi kinerja serta Capaian Kinerja**  
**tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020**

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2020
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi (>2,900 Th. 2026)	2.849	100 %	2.849	skor 2.849 + sertifikat dengan skor Tinggi
Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi	Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota	88,2 %	125 %	70,5%	70,5%
Meningkatnya Kerjasama Lintas Sektorat dengan Provinsi Jambi	Jumlah kerjasama yang difasilitasi	9 kali	330%	167 %	-
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	B	B	B	-
Akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	B	100%	100%	100%

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi tahun 2022 **sama** dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.
- 2) Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota tahun 2022 **lebih tinggi** dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.
- 3) Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Jumlah kerjasama yang difasilitasi tahun 2022 **lebih tinggi** dari tahun sebelumnya.
- 4) Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja IKM tahun 2021 **sama** dengan tahun sebelumnya.

Adapun analisis atas capaian kinerja di atas, yaitu :

**Sasaran I : MENINGKATNYA NILAI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) PROVINSI JAMBI**

**1. Indikator Kinerja : Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi**

Capaian Kinerja atas Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi tahun 2022 menggunakan data hasil evaluasi LPPD yang dilakukan oleh Kemendagri atas LPPD Tahun 2021, dikarenakan proses penyusunan LKj dilakukan sebelum proses evaluasi LPPD. Adapun capaian kinerja atas jumlah nilai LPPD tahun 2022, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Capaian Kinerja Nilai LPPD Tahun 2022**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Kinerja Tahun 2022</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun 2022</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>Nilai LPPD Pemerintah Provinsi Jambi</b>	<b>2,600</b>	<b>2,849</b>	<b>114%</b>

Capaian Kinerja atas Jumlah Nilai LPPD tahun 2021 menggunakan data hasil evaluasi LPPD yang dilakukan oleh Kemendagri atas LPPD Tahun 2022, dikarenakan proses penyusunan LKj dilakukan sebelum proses evaluasi LPPD. Meningkatnya nilai LPPD Provinsi Jambi dikarenakan peningkatan kinerja dimasing-masing

organisasi perangkat daerah yang melebihi target indikator kinerja organisasi perangkat daerah dan adanya support dari para kepala perangkat daerah terkait dengan penyediaan data dukung serta data capaian indikator kinerja. Yang penting adanya keselarasan, kerjasama dan koordinasi yang baik antara Tim penyusun dan Tim reвью Aparat Pengendalian Intern Pemerintah sehingga realisasi nilai LPPD Provinsi Jambi melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja atas jumlah nilai LPPD tahun 2021, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Capaian Kinerja Nilai LPPD Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Nilai LPPD	2,500	2,849	114%

## **Sasaran II : MENURUNNYA SENGKETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI**

### **1. Indikator Kinerja : Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota**

Capaian Kinerja atas Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota dihitung dengan formula : membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dikalikan 100%.

**Tabel 3.8**  
**Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Target Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2022
(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota	76%	88,2%	125%

2. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Target Kinerja 2022 (sesuai dengan yang ada pada dok Renstra)	Capaian Kinerja atas Target Renstra Tahun 2021	Ket
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi (>2,600 Th. 2022)	2.849	2.600	114 %	Tercapai
Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi	Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota	88,2 %	76 %	125 %	Tercapai
Meningkatnya Kerjasama Lintas Sektorat dengan Provinsi Jambi	Jumlah kerjasama yang difasilitasi	30 kali	9 kali	330%	Tercapai
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	62 - 79 (B)	B	100%	Tercapai

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

**Sasaran I : MENINGKATNYA NILAI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) PROVINSI JAMBI**

**1. Indikator Kinerja : Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi**

Realisasi atas Indikator Kinerja Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi **telah mencapai** dengan target yang dipertjanjikan.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap peningkatan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi tata cara pengisian data indicator kinerja kunci secara valid dan benar pada Subbagian Perencanaan dan Pelaporan pada satuan kerja perangkat daerah Provinsi Jambi.
- 2) Memberikan pemahaman pada pada perangkat daerah pentingnya bukti pendukung sebagai bahan kelengkapan data pada indicator kinerja kunci perangkat daerah.
- 3) Memperkuat peran kegiatan rapat riview data laporan penyelenggaran pemerintah daerah pada tiap perangkat daerah sebelum tim dari pemerintah pusat turun ke daerah.



**Sasaran II : MENURUNNYA SENGKETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI**

**1. Indikator Kinerja : Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota**

Realisasi atas Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota **telah tercapai** dengan target yang diperjanjikan.

**Sasaran III : MENINGKATNYA KERJASAMA LINTAS SEKTORAL DENGAN PROVINSI JAMBI**

**Indikator Kinerja : Jumlah Kerjasama yang di Fasilitasi**

Realisasi atas Indikator Kinerja Jumlah Kerjasama yang di Fasilitasi **telah mencapai** dengan target yang diperjanjikan.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi selama tahun 2022 terhadap peningkatan Jumlah Kerjasama yang di Fasilitasi adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya dorongan dari Gubernur Jambi terkait pelaksanaan kerjasama antar pemerintah dan antar Badan Usaha/ Swasta sebagaimana diamanatkan dalam PP nomor 22 Tahun 2020.
- 2) Sebagai salah satu bentuk penjabaran dari visi misi Gubernur Jambi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat didasarkan pada efisiensi dan efektifitas pelayanan public serta saling menguntungkan.

- 3) Memberikan pemahaman kepada perangkat daerah Provinsi Jambi tentang pentingnya peningkatan kerjasama dengan Provinsi Jambi.

Kerja sama yang dilakukan ini adalah kegiatan untuk menegakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi untuk pembangunan masyarakat Provinsi Jambi. Kerja sama antar pemerintah dan daerah telah dilaksanakan dengan seluruh provinsi di pulau Sumatera yang termasuk dalam kerja sama wajib antar daerah dan provinsi di luar pulau Sumatera yaitu provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, untuk provinsi Jawa Timur dikhususkan untuk peningkatan sector ekonomi sebagai pemasok bahan baku dalam pasar-pasar di Provinsi Jambi.

Kerja sama antar lembaga/ swasta telah dilaksanakan dengan hampir seluruh perguruan tinggi di Provinsi Jambi untuk meningkatkan taraf pendidikan yang ada agar tercipta sumber daya yang berkualitas dan dengan lembaga lain di Provinsi Jambi untuk menuju kesejahteraan, ketentraman di Provinsi Jambi.

#### **Sasaran IV : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

##### **Indikator Kinerja : IKM**

Realisasi atas Indikator Kinerja IKM **telah mencapai** dengan target yang diperjanjikan.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi selama tahun 2022 terhadap peningkatan IKM adalah sebagai berikut :

- 1) Pelayanan dilaksanakan secara efisien dan jelas sesuai dengan SOP yang ada.

- 2) Menerapkan prinsip budaya kerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- 3) Memberikan pelayanan terbaik pada setiap masyarakat yang mempunyai urusan dengan Biro Pemerintahan dan Otda.

Dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan maka perlu perhatian penuh terhadap peningkatan pengetahuan, keahlian dan keterampilan petugas pemberi layanan pada setiap unit pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Kegiatan seminar, magang, pendidikan dan pelatihan secara berkala harus terprogram secara baik oleh pihak manajemen sehingga setiap petugas punya maklumat yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pendukung kinerja.

**Tabel 3.10**  
**Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya pendukung kinerja**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2022	Serapan Anggaran (%)	Ket
1	2	3	4	6
Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi (>2,500 Th. 2021)	114%	447.727.608 (97,80%)	Efisien
Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi	Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota	125 %	228.829.027 (94,47 %)	Efisien

Meningkatnya Kerjasama Lintas Sektorat dengan Provinsi Jambi	Jumlah kerjasama yang difasilitasi	330%	242.667.944 (98,20%)	Efisien
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	100%	(100%)	Efisien

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Atas sasaran strategis Meningkatkan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi penggunaan sumber daya yang digunakan **telah efisien** dikarenakan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh **lebih besar** dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang digunakan.
2. Atas sasaran strategis Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi penggunaan sumber daya yang digunakan **telah efisien** dikarenakan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh **lebih besar** dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang digunakan.
3. Atas sasaran strategis Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektorat dengan Provinsi Jambi penggunaan sumber daya yang digunakan **telah efisien** dikarenakan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh **lebih besar** dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang digunakan.
4. Atas sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik penggunaan sumber daya yang digunakan **telah efisien** dikarenakan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh **lebih besar** dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang digunakan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.11**  
**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2022	Ket	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi (>2,500 Th. 2021)	2,600	2,849	Tercapai	Program Pemerintahan dan Otda	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi	Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota	76 %	70, 5 %	Tidak Tercapai	Program Pemerintahan dan Otda	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Meningkatnya Kerjasama Lintas Sektorat dengan Provinsi Jambi	Jumlah kerjasama yang difasilitasi	9	30	Tercapai	Program Pemerintahan dan Otda	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	62-79 (B)	B	Tercapai	Program Administrasi Umum	Kegiatan Adm. Umum Perangkat Daerah

### **B. Realisasi Anggaran**

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2022 sebesar 96,47% dari total anggaran yang dialokasikan, adapun rinciannya sebagaimana dibawah ini

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Anggaran Kegiatan**

No	Program/ SubKegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi s.d Desember			Sisa Anggaran (Rp)
			Penyerapan (Rp)	Keua ngan (%)	Fisik (%)	
	<b>Program Administrasi Umum</b>	<b>165.678.847</b>	<b>165.598.478</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>	<b>80.369</b>
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>165.678.847</b>	<b>165.598.478</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>	<b>80.369</b>
1.	- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	58.396.920	58.321.970	99,95	99,95	74.950
2.	- Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	39.539.386	39.537.504	100	100	1.882
3.	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.742.386	67.739.004	99,87	99,87	3.537
	<b>PROGRAM PEMERINTAH DAN OTONOMI DAERAH</b>	<b>3.759.724.153</b>	<b>3.621.348.222</b>	<b>96.32</b>	<b>96.32</b>	<b>138.375.931</b>
	<b>Pelaksanaan Tugas Pemerintah</b>	<b>2.734.043.373</b>	<b>2.644.353.302</b>	<b>96,72</b>	<b>96,72</b>	<b>89.689.432</b>
1	- Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintah	2.385.051.291	2.311.513.302	96,92	96,92	73.537.989
2	- Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	106.775.560	104.011.612	97,41	97,41	2.763.948
3	- Fasilitas Penataan Wilayah	242.216.522	228.829.027	94,47	94,47	13.387..495

	<b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>778.563.130</b>	<b>734.326.337</b>	<b>94,32</b>	<b>94,32</b>	<b>44.236.793</b>
5	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	161.101.900	138.733.213	86,12	86,12	<b>22.367.687</b>
6	Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	159.656.410	147.865.516	92,61	92,61	11.790.894
7	Evaluasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan	457.805.820	447.727.608	97,80	97,80	10.078.212
	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>247.117.650</b>	<b>242.667.944</b>	<b>98,20</b>	<b>98,20</b>	<b>4.449.706</b>
8	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintahan	96.657.150	94.338.294	97,60	97,60	2.318.856
9	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	55.235.250	54.872.150	99,34	99,34	363.100
10	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	95.225.250	93.457.500	98,14	98,14	1.767.750
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>PROGRAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1	Kegiatan	0,00	0,00	0	0	0,00
2	Kegiatan	0,00	0,00	0	0	0,00
3	Kegiatan	0,00	0,00	0	0	0,00
<b>JUMLAH TOTAL BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG</b>		<b>3.925.403.000</b>	<b>3.786.946.700</b>	<b>96,47</b>	<b>96,47</b>	<b>138.456.300</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyelenggaraan kegiatan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun ke dua dari Rencana Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Dari laporan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2022, dapat disimpulkan indikator sasaran strategis yang ditetapkan telah tercapai. Bahkan capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir periode perencanaan jangka menengah. Dengan capaian tersebut maka diperlukan langkah tindak lanjut berupa penentuan target baru yang mencerminkan kinerja yang lebih tinggi. Penentuan target tersebut dilakukan melalui mekanisme review rencana strategis perangkat daerah.



### **Kata Pengantar**

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jambi, 20 Januari 2022

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA**

**Drs. R. NAJMI**

NIP. 19660403 198512 1 001

### **Ikhtisar Eksekutif**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021- 2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemampuan penyelenggaraan daerah di Provinsi Jambi
2. Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi
3. Meningkatnya kerja sama lintas sektoral dengan Provinsi Jambi
4. Meningkatnya kualitas pelayanan public
5. Akuntabilitas kinerja

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya sinergi setiap level manajemen untuk berkontribusi memecahkan masalah
2. Perlunya meningkatkan intensitas komunikasi dan kerjasama dengan para pemangku kebijakan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

## Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Struktur Organisasi .....	2
1.2 Fungsi dan Tugas .....	3
1.3 Isu-Isu Strategis .....	13
1.4 Keadaan Pegawai .....	13
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana .....	15
1.6 Keuangan .....	16
1.7 Sistematisasi LKj IP .....	17
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	 19
2.1 Perencanaan Strategis .....	19
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah .....	19
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	23
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan .....	24
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	25
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022 .....	26
2.3.1 Target Belanja .....	27
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	29
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 31
3.1 Capaian Kinerja .....	31
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	32

3.2.1 Sasaran meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi .....	32
3.2.2 Sasaran menurunnya sengketa batas wilayah administrasi .....	33
3.2.3 Sasaran meningkatnya kerjasama lintas sektoral dengan Provinsi Jambi .....	34
3.2.4 Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan Public .....	35

#### BAB IV PENUTUP

##### LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi

Lampiran 2 Matriks Renstra 2021-2026

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja

Lampiran 4 Pengukuran Kinerja

Lampiran 5 Rencana Aksi

### Daftar Tabel

Table 1.1	Sarana dan prasarana
Tabel 2.1	Tujuan dan sasaran
Tabel 2.2	Sasaran Strategis
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Tabel 2.4	Rencana Kerja Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Tabel 2.5	Target Belanja
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Per Sasaran Startegis Tahun 2022
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2022
Tabel 3.2	Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota
Tabel 3.3	Realisasi dan Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Jumlah Kerjasama yang di Fasilitas Tahun 2022
Tabel 3.4	Realisasi dan Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Skor Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022
Tabel 3.5	Perbandingan antara realisasi kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Nilai LPPD Tahun 2022
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Nilai LPPD Tahun 2021
Tabel 3.8	Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota Tahun 2022
Tabel 3.9	Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota Tahun 2021
Tabel 3.10	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Tabel 3.11	Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya pendukung Kinerja
Tabel 3.12	Analisis program/kegiatan yang menunjang, keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Kegiatan